



LKJ*i*P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Sutan Syahrir Nomor 42, Madurejo, Arut Selatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
74112

Telepon : (0532) 21200 | E-mail : dpmdkobarkab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023–2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Perangkat Daerah berkewajiban menyusun LKjIP sesuai dengan sistematika peraturan yang sudah ditentukan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan Strategis dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perangkat daerah.

Pangkalan Bun, Februari 2024
KEPALA DINAS,

YUDHI HUDAYA, S.STP
NIP. 19770127 199612 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Peringkat Kinerja
1	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan	Indeks Desa Membangun	0,8212	0,8418	103%	Sangat Tinggi
	Capaian Strategis 1				103%	
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Akip	A (80,5)	B (60,45)	75%	Sedang
	Capaian Strategis 2				75%	
3	Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	38	39	103%	Sangat Tinggi
	Capaian Strategis 3				103%	
4	Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100%	Sangat Tinggi
	Capaian Strategis 4				100%	

Sumber: DPMD Kab.Kotawaringin Barat, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas yang perlu diperhatikan terkait realisasi IDM tersebut merupakan data penilaian tahun 2022 dengan tahun anggaran 2023. Penilaian IDM dilakukan n+1. Hasil penilaian IDM tahun 2023 akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada triwulan III di tahun 2024, Adapun *timeline* kegiatan penilaian dan pemutakhiran IDM terlampir.

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 sebesar 103% dengan peringkat kinerja sangat tinggi dan 75% untuk peringkat kinerja yang dinilai “Sedang” Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan sebagaimana rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP 2023, sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan pohon kinerja dengan cascading kinerja tingkat perangkat daerah.
- b. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja yang disusun harus memperhatikan indikator kinerja di dalam Renstra.
- c. Memperhatikan kinerja secara berjenjang dan menjanjikan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas dan strategis pencapaian kinerja.
- d. Memperhatikan hasil evaluasi periodik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berjalan.
- e. Mendorong terciptanya budaya kinerja dengan cara memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dalam pencapaian kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Data Umum	2
1.3 Aspek Strategis	9
1.4 Permasalahan Utama.....	12
1.5 Landasan Hukum	13
1.6 Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Indikator Kinerja Utama	18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	19
2.3 Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	28
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	38
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.5 Realisasi Keuangan	41
BAB IV PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat 2023-2026	iii
Tabel 1. 2 Peta Jabatan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 .	3
Tabel 1. 3 Data Pegawai Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat	4
Tabel 1. 4 Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 2023	7
Tabel 1. 5 Alternatif Strategi	11
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kab.KOTawaringin Barat Tahun 2023-2026	17
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	21
Tabel 2. 5 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian.....	5
Gambar 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 2. 1Aplikai Smart PKK.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 DINAS PMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi Dalam menjalankan tugas pokok sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Pembinaan dan Pengorganisasian dalam Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
4. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Pembinaan dan Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Peta Jabatan Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Sub Bagian Tata Usaha 4. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 6. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolah data Perencanaan & Penganggaran (Pengadministrasi Umum) 2. Dibawah Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Surat (Pengadministrasi Umum) b. Pengelola Barang Milik Negara (Pengadministrasi Umum) 3. Dibawah Sub Bagian Verifikasi dan Keuangan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Bendahara Pengeluaran (Penelaah Teknis Kebijakan) b. Verifikator Keuangan (Pengadministrasi Umum) 4. Dibawah Bidang Administrasi Pemerintahan Desa , terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi (Penelaah Teknis Kebijakan) b. Pengadministrasi Umum (Pengolah Data dan Informasi) 5. Dibawah Penataan dan Kerjasama Desa terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum (Pengolah Data dan Informasi) 6. Dibawah Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum (Pengolah Data dan Informasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencana Ahli Muda 2. Dibawah Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda b. Analis Kebijakan Ahli Muda 3. Dibawah Bidang Penataan dan Kerjasama Desa terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda b. Analis Kebijakan Ahli Muda 4. Dibawah Bidang Administrasi Pemerintahan Desa , terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda b. Analis Kebijakan Ahli Muda

Sumber: Data Pegawai Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda. Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan

dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan.

Tabel 1. 3 Data Pegawai Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat Per 31 Desember 2023

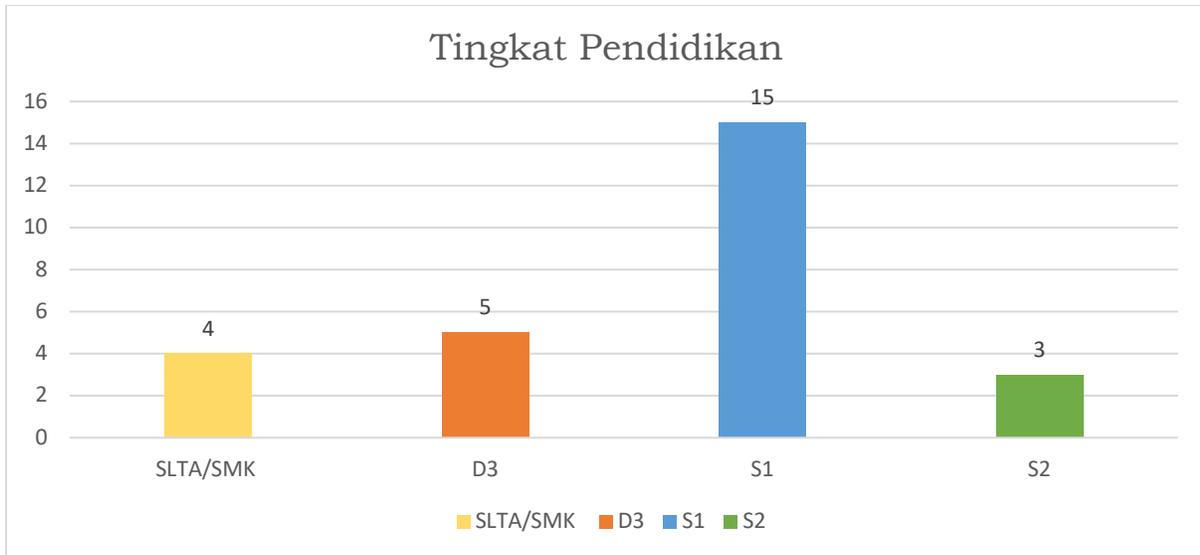
Jabatan	Jumlah Pegawai
Jabatan Struktural	6 orang
Fungsional	10 orang
Pelaksana	11 orang
Tenaga Kerja Daerah	11 orang

Sumber: Data Pegawaian Dinas PMD Kab.Kotawaringin, 2023

Adapun pegawai pada dinas Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

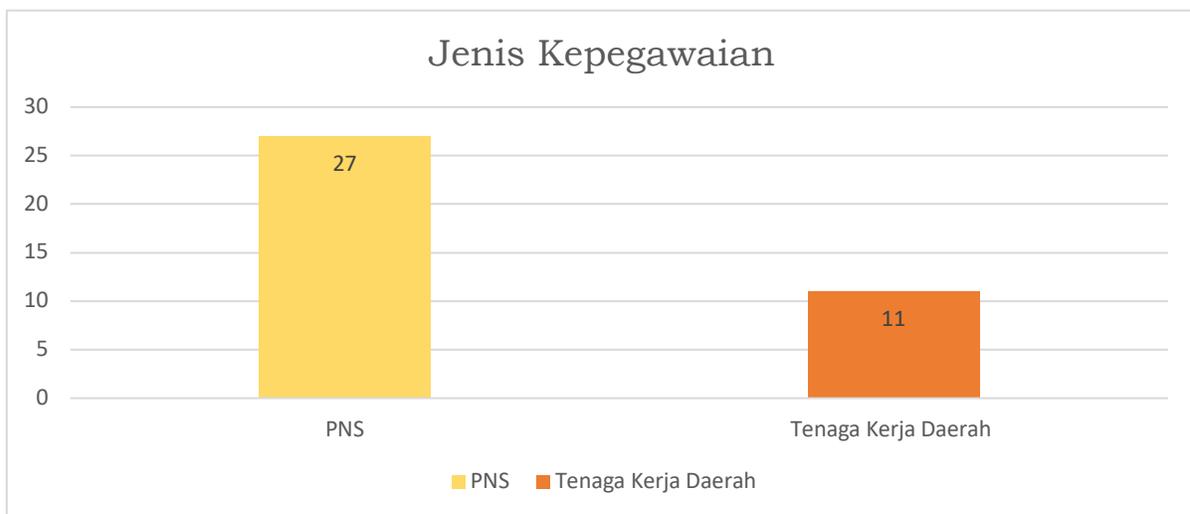


Gambar 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data Pegawai Dinas PMD Kab.Kotawaringin, 2023

2. Jenis Kepegawaian

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, menurut jenis kepegawaian terdiri dari :



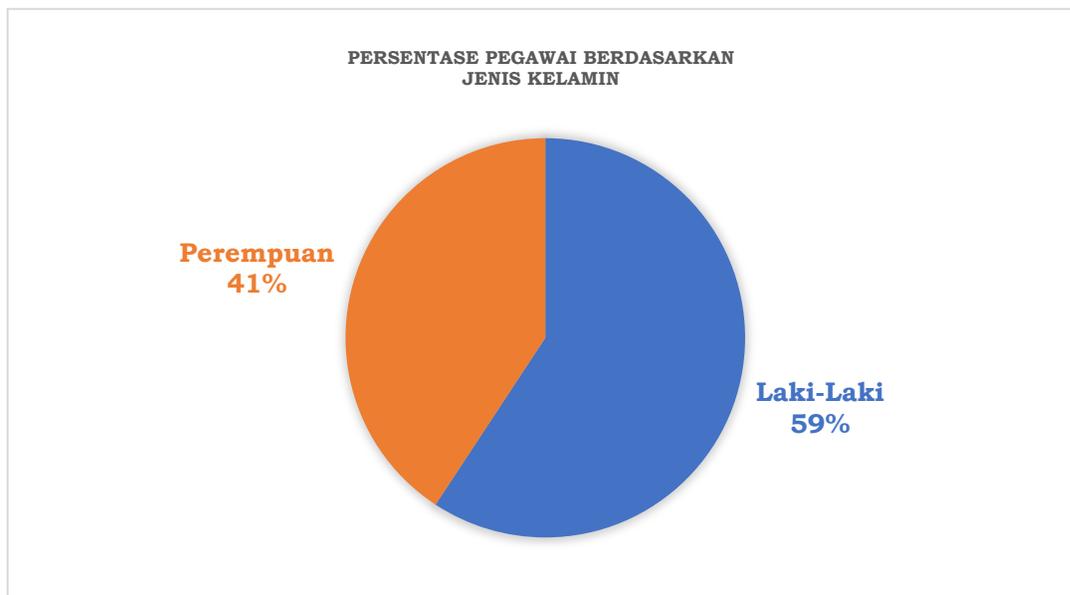
Gambar 1. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

Sumber: Data Pegawai Dinas PMD Kab.Kotawaringin, 2023

3. Jenis Kelamin

Menurut komposisi jenis kelamin, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini :

- a. Laki – laki : 16 orang
- b. Perempuan : 11 orang



Gambar 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Pegawai Dinas PMD Kab.Kotawaringin, 2023

4. Pangkat / Golongan

Berdasarkan pangkat/golongan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas :

- a. Golongan IV/c : 1 (satu) orang
- b. Golongan IV/b : 1 (satu) orang
- c. Golongan IV/a : 4 (empat) orang
- d. Golongan III/d : 11 (sebelas) orang
- e. Golongan III/c : - orang
- f. Golongan III/b : 7 (tujuh) orang
- g. Golongan III/a : 3 (tiga) orang

Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 4 Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 2023

Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Bagian Tata Usaha	10	2	8
Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
Pengawas Keuangan Negara Terampil	1	0	1
Operator Layanan Operasional	4	0	4
Bagian Verifikasi dan Akuntansi	4	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
Jabatan Fungsional			
Perencana	4	1	3
Perencana Ahli Muda	1	1	0
Perencana Pertama	1	0	1
Pranata Komputer Ahli Muda	2	0	2
Jabatan Pelaksana	2	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	8	4	4
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
Pengolah Data dan Informasi	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	13	6	7
Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	1	1
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2
Pengolah Data dan Informasi	3	2	1
Pengadministrasi Perkantoran	3	0	3
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	7	4	3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2	2	0
Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
Pengolah Data dan Informasi	2	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 202

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun

2023, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Data Aset Tahun 2023

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	TANAH	TANAH	1	354.800.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	PERALATAN DAN MESIN	334	1.432.022.430,00
		Alat-alat Besar	-	-
		Alat-alat Angkutan	-	304.490.000,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	35.340.000,00
		Alat Pertanian	-	852.270,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	963.392.660,00
		Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	115.947.500,00
		Alat-alat Kedokteran	-	-
		Alat Laboratorium	-	-
		Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	12.000.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	3	978.471.200,00
		Bangunan Gedung	-	978.471.200,00
		Monumen	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-
		Jalan dan Jembatan	-	-
		Bangunan Air/Irigasi	-	-
		Instalasi	-	-
		Jaringan	-	-
5	ASET TETAP LAINYA	ASET TETAP LAINYA	-	-
		Buku dan Perpustakaan	-	-
		Barang Bercorak Kebudayaan	-	-
		Hewan dan Ternak serta Tanaman	-	-
		Aset Tetap Lainnya	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	48.675.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	48.675.000,00
7	ASET LAINNYA	ASET LAINNYA	35	252.550.500,00
		Aset Kondisi Rusak Berat	-	142.203.000,00
		Aset Dalam Proses Hibah	-	-
		Aset Dalam Proses Lelang	-	-
		Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-
		Aset Renovasi	-	-
		Aset Dalam Penelusuran	-	-
		Aset Tidak Berwujud	-	110.347.500,00
		Koreksi / Dobel Catat	-	-
			374	3.066.519.130,00

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Optimalisasi Penguatan laporan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas, cerdas dan bermartabat.
3. Peningkatan penataan desa dalam penyelesaian tata batas desa.
4. Peningkatan kompetensi SDM di perdesaan.
5. Optimalisasi Integrasi dokumen perencanaan Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa.
6. Optimalisasi Penguatan dan peningkatan peran BUMdesa dan Bumdes Bersama (BUMDesma) .
7. Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dengan RPD sebagai Upaya Mengawal Pembangunan Desa Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*).

Identifikasi Dampak internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud Dampak dalam gambar dibawah ini:

STRENGTH	WEAKNESS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Regulasi tentang desa dan keuangan desa sebagai pedoman teknis pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi. 2. Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diperjanjikan. 3. Adanya P3MD sebagai <i>stakeholder</i> dalam menunjang tugas dan fungsi serta ketercapaian tujuan Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat. 4. Adanya sistem <i>crosscutting</i> antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kompetensi pegawai dalam bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, dan kelembagaan desa. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat 3. Keterbatasan sumber daya anggaran dalam menunjang peningkatan kompetensi pegawai pada Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat
OPPORTUNITY	THREATS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Desa memberikan kesempatan desa untuk mandiri dan berdikari. 2. Pembangunan Desa Mendapatkan Perhatian Besar Dari Pemerintah Pusat 3. Besarnya Dana Desa yang Digelontorkan Pemerintah Pusat Kepada Desa 4. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai Mandatory Pusat Dalam Pembangunan Desa 5. Masih banyak Sumber Daya Alam desa yang bisa di eksplorasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses infrastruktur telekomunikasi masih belum sepenuhnya memadai, masih terdapat desa yang tidak terhubung jaringan telekomunikasi (<i>blank spot</i>). 2. Kondisi geografis desa-desa di Kab. Kotawaringin Barat yang terpisah agak jauh menyebabkan kesulitan koordinasi 3. ADD dan DD dengan anggaran yang besar berpotensi untuk disalahgunakan dan atau tidak optimal pemanfaatannya 4. Terbatasnya kompetensi aparatur desa dalam bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, dan kelembagaan desa.

Sumber : Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat, 2023

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar

dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari pemetaan dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal diatas, maka dapat dirumuskan alternatif-alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Alternatif Strategi

S + O	W+O
<ul style="list-style-type: none"> a. Akselerasi Peningkatan Desa Mandiri melalui penguatan variabel penilaian sesuai regulasi Permendesa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. b. Efektifitas Pembangunan Desa melalui stakeholder dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. c. Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi inisiasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, dan kelembagaan desa. b. Optimalisasi skala prioritas dalam menggunakan anggaran untuk dialokasikan pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang program perangkat daerah.
S+T	W+T
<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Komitmen pimpinan dalam memberikan pelatihan terhadap penggunaan dan pengelolaan DD dan ADD. b. Optimalisasi sistem <i>crosscutting</i> antar perangkat daerah dalam permasalahan Akses infrastruktur telekomunikasi masih belum sepenuhnya memadai, masih terdapat desa yang tidak terhubung jaringan telekomunikasi (<i>blank spot</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas PMD Kab.Kotawaringin Barat dalam rangka memaksimalkan proses koordinasi utamanya untuk desa yang memiliki <i>blank spot</i> dan yang aksesibilitasnya terbatas.

Sumber : Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat, 2023

Setelah menemukan alternatif-alternatif strategi yang akan diambil melalui analisa SWOT diatas, maka untuk mempertajam dan menjadikan alternatif-alternatif tersebut diatas menjadi strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat 5 tahun kedepan.

1.4 Permasalahan Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kolaborasi dalam mewujudkan Indeks Desa Membangun Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan Desa yang dilakukan setiap tahun. IDM memiliki 3 komposit perhitungan yang mencakup aspek ekonomi (indeks ketahanan ekonomi), aspek sosial (indeks ketahanan sosial) dan aspek lingkungan / ekologi (indeks ketahanan lingkungan). Dalam mewujudkan IDM secara efektif, maka diperlukan optimalisasi kolaborasi secara holistik dalam bentuk *crosscutting* antar perangkat daerah teknis, terkait 3 aspek dalam perhitungan IDM. DPMD tidak memiliki tugas fungsi dan wewenang dalam pembangunan secara langsung di tiga lingkup aspek tersebut. Peran DPMD dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang menjembatani perangkat daerah terkait dengan pemerintah desa di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mendukung pembangunan desa yakni mengentas desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri. Sejauh ini belum ada peraturan konkret yang menetapkan *crosscutting* antar perangkat daerah yang terlibat.
2. Belum optimalnya Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas, cerdas dan bermartabat.
3. Belum optimalnya Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
4. Belum optimalnya kelembagaan dan ekonomi Desa yang dalam mendorong

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKJiP meliputi regulasi berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2023-2026. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dokumen Renstra DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026, disusun berdasarkan penjabaran visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2025. yang dituangkan pada dokumen RPD tahun anggaran 2023-2026 untuk dijadikan acuan, RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPD 2023-2026 yang *tercascade* pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025. Berikut merupakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025.

Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025:

**Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri,
Demokratis, Dan Berkeadilan**

Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025:

1. Mewujudkan Masyarakat Kotawaringin Barat yang Aman;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Mempercepat Kecukupan Sarana dan Prasarana Umum Secara Integratif dan Komprehensif dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah;
5. Mewujudkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk Pengembangan Agroindustri dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan;

6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 maka dalam dokumen Renstra DPMD mendukung mendukung tujuan daerah, hal tersebut dapat di lihat Tujuan 1 terkait “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong Pengembangan Sektor-Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif” dengan indicator tujuan “Pertumbuhan Ekonomi”. Tujuan RPD tersebut di jabarkan

melalui sasaran yang diampu DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu “Meningkatnya Kemandirian Desa” dengan tolok ukur indikator “Indeks Desa Membangun”

Renstra DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Tabel Terlampir.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kab.KOTawaringin Barat Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Target Akhir Renstra
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai AKIP	BB (71,40)	A (80,5)	A (81,0)	A (81,5)	A (82,0)	A (82,0)
2	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan		Indek Desa Membangun	0.8238	0,8246	0,8254	0,8262	0,8322	0,8322
		Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	34	38	45	52	57	57
		Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	6	5	5	5	6	6

Sumber : Renstra Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2023-206

Penetapan tujuan Dinas PMD ini merupakan upaya dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran level Kabupaten agar dapat terwujud secara berkesinambungan dan terintegrasi. Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat memiliki peran dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja “Nilai AKIP” yang mana hal tersebut akan mendukung ketercapaian target nilai SAKIP level Kabupaten, yang kedua berdasarkan kesesuaian urusan pemerintah yakni terkait

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Dinas PMD berupaya Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan dengan indikator kinerja “Indeks Desa Membangun”. Adanya pengukuran Indeks Desa Membangun tersebut dapat diperoleh informasi terkait aspek keberdayaan Desa, sumber daya manusia serta ketahanan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi instrument pertimbangan bagi *decision maker* dalam mengambil kebijakan yang ideal.

1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan	Indeks Desa Membangun	$\frac{1}{3} \times 1(IKS + IKE + IKL)$	DPMD Kab. Kotawaringin Barat	Skor IDM

Sumber : SK Kepala Dinas PMD NO 9 Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Sasaran strategis yang mengacu pada sasaran RPD

2023-2026 yaitu Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan, dengan tolok ukur indikator Indeks Desa Membangun (IDM). IDM bertujuan untuk dapat mengukur status desa melalui 3 dimensi indeks komposit hitung yaitu IKS (Indeks Ketahanan Sosial), IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) dan IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan). Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 – 1.

Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

- a. Sebagai basis data (*base line*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
- b. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Sebagai masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
- d. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

1.2 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja

SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai AKIP	A (80,5)
2.	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi dan ekologi /lingkungan	Indek Desa Membangun	0,8246
3	Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	38
4	Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	5

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

1.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET
1	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan	Indeks Desa Membangun	0,8254
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Akip	A (80,5)

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)
Sasaran Strategis	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel			
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.119.802.247	5.200.285.537	80.483.290
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.211.400	33.862.220	(10.349.180)
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.221.800	24.872.620	(10.349.180)
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.700	1.499.700	-
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.250	1.500.250	-
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.700	499.700	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	499.700	499.700	-
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.990.450	2.990.450	-
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800	1.999.800	-
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.251.270.828	4.073.751.021	(177.519.807)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.209.411.028	4.032.181.329	(177.229.699)
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000		(1.000.000)
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.360.000	40.069.892	(290.108)
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	499.800	499.800	-
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	502.600	502.600	-
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	199.850	199.850	-
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.250	103.250	-
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.750	99.750	-
2.13.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	99.750	99.750	-
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.600.000	16.200.000	(2.400.000)
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.600.000	16.200.000	(2.400.000)
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.238.192	226.722.152	97.483.960
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.150	5.400.150	-
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.846.315	39.846.315	-
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.794.577	5.794.577	-
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.162.350	8.162.350	-
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.034.800	167.518.760	97.483.960
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	411.048.845	585.980.956	174.932.111
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	376.086.354	494.870.000	118.783.646
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.499.999	12.499.999	-
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.462.492	78.610.957	56.148.465

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.214.832	193.539.038	1.324.206
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.992.432	55.463.238	(6.529.194)
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.222.400	138.075.800	7.853.400
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.715.550	69.727.550	(2.988.000)
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.864.800	14.876.800	(2.988.000)
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.860.000	17.860.000	-
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.990.750	36.990.750	-
Sasaran Strategis	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan			
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	39.997.800	154.397.300	114.399.500
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	39.997.800	154.397.300	114.399.500
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	14.999.700	8.069.700	(6.930.000)
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	14.998.500	136.328.000	121.329.500
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	9.999.600	9.999.600	-
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	59.999.500	45.599.800	(14.399.700)
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	59.999.500	45.599.800	(14.399.700)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9.999.800	9.999.800	-
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	9.999.700	-	(9.999.700)
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40.000.000	35.600.000	(4.400.000)
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.028.227.433	5.297.181.983	2.268.954.550
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.028.227.433	5.297.181.983	2.268.954.550
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	29.412.300	49.411.850	19.999.550
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	835.603.700	893.162.550	57.558.850
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	24.999.960	44.999.810	19.999.850
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.900.000.223	4.027.993.023	2.127.992.800
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.499.750	7.499.750	-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10.000.000	19.999.700	9.999.700
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		14.999.900	4.999.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.090.000	6.588.000	(2.502.000)

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	PAGU APBD SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	200.711.500	200.711.500	-
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		18.403.900	18.403.900
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	20.000.000	20.000.000	-
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.110.241.020	1.127.343.380	17.102.360
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.110.241.020	1.127.343.380	17.102.360
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10.000.000	20.227.500	10.227.500
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4.999.650	4.999.650	-
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26.999.750	75.465.500	48.465.750
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.980.650	9.980.650	-
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	48.261.500		(48.261.500)
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.009.999.470	1.016.670.080	6.670.610
JUMLAH		9.358.268.000	11.824.808.000	2.466.540.000

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2023

Dalam mendukung ketercapaian tujuan perangkat daerah maka adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung yang disertai dengan anggaran untuk menyelenggarakannya dengan rincian seperti pada tabel diatas. Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa terdapat perubahan anggaran dan sub kegiatan yang berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan

dan kondisi urgensi Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 2.466.540.000,-

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. e-Sakip

Aplikasi yang mengintegrasikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja dan evaluasi kinerja secara periodik yakni triwulan sampai tahunan. Aplikasi ini memantau kinerja individu sampai capaian Perangkat Daerah.

2. SMART PKK

Keseluruhan proses pelaporan data berlangsung secara manual. Dengan hadirnya aplikasi SIM/SMART PKK, harapannya pengguna mampu memberi data dan informasi tentang 10 program pokok PKK secara cepat, akurat, serta menyeluruh. Mulai dari dasawisma, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga tingkat pusat. Dengan memanfaatkan aplikasi sim pkk, maka para kader tidak perlu lagi melakukan perekapan laporan secara manual.

Gambar 2. 1Aplikasi Smart PKK



Sumber: DPMD Kab.Kotawaringin Barat

3. PEKA DESA

Perencanaan dan usulan program pemerintah desa dan masyarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Karenanya diperlukan sebuah ruang agar antara stake holder bisa saling terhubung dan berkomunikasi sehingga melalui Program PEKA DESA (Perencanaan tErintegrasi KABupaten dan Desa) diharapkan arah pembangunan didesa yang dilaksanakan oleh Kabupaten merupakan usulan-usulan dari Desa untuk selajutnya ditidaklajuti oleh Kabupaten melalui instansi teknis terkait.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1 . Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 5 (lima) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian	Peringkat Kinerja
1	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan	Indeks Desa Membangun	0,8212	0,8418	102%	Sangat Tinggi
					Capaian Strategis 1	
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Akip	A (80,5)	B (60,45)	75%	Sedang
					Capaian Strategis 2	
3	Meningkatnya Status Pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	38	39	103%	Sangat Tinggi
					Capaian Strategis 3	
4	Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100%	Sangat Tinggi
					Capaian Strategis 4	

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas yang perlu diperhatikan terkait realisasi IDM merupakan data penilaian tahun 2022 dengan tahun anggaran 2023. Penilaian IDM dilakukan n+1. Hasil penilaian IDM pada tahun 2023 akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada triwulan III di tahun 2024.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1

Sasaran: Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

- Indikator Kinerja : Indeks Desa Membangun

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8212	0,8418	103%

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel diatas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra, maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun	0,6277	0,6743	0,7107	0,7911	0,8238	0,8418	Penilan pada Triwulan III tahun 2024
	Capaian Kinerja (%)						
	100	100	100	100	100	102	Penilan pada Triwulan III tahun 2024

Sumber : Publikasi IDM Kemendes, 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel, berikut ini :

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun	0,6277	0,6743	0,7107	0,7911	0,8238	0,8238	0,8212
	Realisasi Kinerja						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,6277	0,6743	0,7107	0,7911	0,8238	0,8418	Penilan pada Triwulan III tahun 2024

Sumber : Data diolah oleh PMD Kab. Kotawaringin Barat , 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas memuat informasi perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja “Indeks Desa Membangun” dari tahun 2017 hingga 2023. Indeks Desa Membangun mulai ditetapkan sebagai IKU Dinas PMD sejak tahun 2023. Namun dinas PMD tetap menjadi *leading sector* dalam verifikasi dan penilaian IDM sejak tahun 2016. Sehingga target sebelumnya masih belum ditetapkan secara legal formal. Penetapan target secara legal formal pada tahun anggaran 2023 dengan dikeluarkannya SK IKU Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2023. Adapun hasil penilaian IDM pada tahun 2023 akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada triwulan III di tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				
	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Desa Membangun	0,8238	0,8212	0,8238	0,8246	0,8254
	Realisasi Kinerja s/d 2023				
	2022	2023	2024	2025	2026
	0,84182	Penilan pada Triwulan II tahun 2024			

Sumber : Data diolah oleh PMD Kab. Kotawaringin Barat , 2024

Tabel diatas didasari oleh Dokumen Renstra tahun 2023-2026, sehingga dalam dokumen pelaporan kinerja LKJiP 2023, realisasi yang dapat di cantumkan adalah realisasi pada tahun 2022 tahun anggaran 2023, sedangkan

penilaian tahun 2023 akan dilakukan Penilaian oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada triwulan II di tahun 2024. Sedangkan tahun 2024 merupakan tahun berjalan, per laporan kinerja ini dibuat 28 Februari 2023. Dari capaian tersebut dapat dianalisis bahwa target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2023 **“Tercapai”** dan melebihi target yang ditetapkan, dengan persentase capaian 103%. Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja, sebagai berikut :

1. Pendampingan dalam pengelolaan dana Desa yang dimulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana Desa yang tepat sasaran dan tepat waktu;
2. Melaksanakan pendampingan dan verifikasi data IDM masing-masing desa pada 81 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertempat di Kecamatan setempat pada triwulan I dan II tahun 2023;
3. Pendampingan dalam pengalokasian penerimaan dana Desa, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan sarana prasarana sebagai pendukung dalam meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Lingkungan. Pendampingan dilakukan dengan melakukan konsinyering APBDES yang diselenggarakan pada Ballroom Mercure pada minggu ke III Desember 2023 ;

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

2

Sasaran: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

➤ Indikator Kinerja: Nilai Akip

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun anggaran 2023 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP	Nilai	A (80,5)	B (60,45)	75%

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data pada tabel diatas yang perlu diperhatikan terkait realisasi Nilai Akip merupakan data penilaian tahun 2022 dengan tahun anggaran 2023. Penilaian Nilai Akip dilakukan n+1. Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra, maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai AKIP	BB (71,40)	A (80,5)	A (81,0)	A (81,5)	A (82,0)
	Capaian Kinerja (%)				
	2022	2023	2024	2025	2026
	100%	75%			

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel, berikut ini :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				
	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai AKIP	BB (71,40)	A (80,5)	A (81,0)	A (81,5)	A (82,0)
	Realisasi Kinerja s/d 2023				
	2022	2023	2024	2025	2026
	BB (71,40)	BB (60,45)			

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari capaian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa target tahun 2023 Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab tidak tercapainya kinerja, sebagai berikut: Sasaran Strategis dalam Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator nilai AKIP pada tahun 2023 adalah nilai **A (80,5)** sementara capaian nilai nilai AKIP tahun 2023 B (60,45). Persentase capaian adalah 75 %. Kondisi ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan nilai AKIP sebelumnya pada tahun 2022 dengan nilai BB (71,40), kondisi ini terjadi oleh beberapa hal:

1. Belum selaras pohon kinerja dengan cascading kinerja tingkat perangkat daerah.
2. Tidak semua ASN menyusun SKP dan melaporkan tepat waktu.
3. Tidak semua kepala bidang berkoordinasi dengan perencanaan dalam menyusun sasaran kinerja tahunan.
4. Pemantauan laporan kinerja masing-masing ASN belum dilakukan secara maksimal dan masif.

5. Belum dilakukan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3 Sasaran: Meningkatnya Status Pembangunan Desa

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

➤ Indikator Kinerja : Jumlah Desa Mandiri

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Mandiri	Desa	38	39	103%

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra, maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Mandiri	9	26	34	39
	Capaian Kinerja (%)			
	2020	2021	2022	2023
	100	100	100	100

Sumber : Kementerian Desa dan PDTT, 2024

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 hingga 2023 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel, berikut ini :

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				
	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa Mandiri	34	38	45	52	57
	Realisasi Kinerja s/d 2023				
	34	39	26	34	39

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari capaian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tercapai**”.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja, sebagai berikut :

1. Fasilitasi pendampingan tata batas desa
2. Pendampingan kepada pengurus BUMDesa dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa, fasilitasi dan pendampingan musyawarah desa LPJ BUMDesa, pendampingan dan bimtek tata kelola BUMDesa. Bimtek tata kelola bumdes dilaksanakan di Aula DPMD peserta 24 orang dari 12 BUMDesa tgl 30-31 Mei 2023
3. Fasilitasi Musdes LPJ BUMDesa di Desa Lada Mandala Jaya pada 28 Februari 2023 dan Desa Sidomulyo pada 23 Mei 2023 (sesuai permendes batas Musdes LPJ 6 bulan setelah tutup buku)
4. Monev pendampingan penyusunan laporan keuangan bumdes di Desa Ipuh Bangun Jaya, Suka Makmur, Purbasari, Pandu Sanjaya, Sumber Mukti, Sagu Sukamulya, Mulya Jadi pada bulan November 2023

5. Pembinaan dan Pendampingan lomba BUMDesa yang dilaksanakan DPMD Prov. Kalteng, pada bulan Agustus 2023
6. Pendampingan kelembagaan yang ada di Desa maupun tingkat Kecamatan berupa PKK dan Posyandu; Kegiatan Pendampingan dilaksanakan di 6 kecamatan. Pesertanya seluruh anggota pokja pkk desa/kelurahan (Pokja I, II, III dan IV)
 - a. Pelaksanaan pelatihan kader
 - b. Sosialisasi penanganan dan pencegahan stunting
 - b. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini
 - c. Pelaksanaan lomba kader
 - d. Pendampingan kegiatan jambore PKK tingkat provinsi.
 - e. Pendampingan terhadap kegiatan UP2K desa/kelurahan

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Keseluruhan program saling mendukung satu dan lainnya dikarenakan kompleksnya komponen penilaian pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

4

Sasaran: Tersusunnya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Dari tabel diatas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra, maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	6	5	5	5	6
	Capaian Kinerja (%)				
	2022	2023	2024	2025	2026
	100	100			

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara target dan realisasi telah tercapai Adapun 5 dokumen tersebut mencakup dokumen LKjIP, Renja, DPA, Laporan Triwulan, dan Laporan Keuangan. Setiap akhir periode renstra target 6 dokumen, Adapun dokumen tambahan tersebut adalah dokumen laporan kinerja renstra perangkat daerah.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel, berikut ini :

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra			
	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	6
	Realisasi Kinerja s/d 2023			
	2023	2024	2025	2026
	5			

Sumber : Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Dari capaian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa target awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tercapai**”.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja, sebagai berikut : Lima dokumen tersebut merupakan dokumen yang fundamental yang harus terpenuhi, maka Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat melakukan koordinasi dan pendampingan antar bidang secara intens dan terjadwal. Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat disandingkan dengan target/standar nasional sebagai berikut :

Target jumlah Desa Mandiri tingkat Nasional oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi ditahun 2023 sebanyak 5.000 Desa, sedangkan target Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 38 desa pada tahun 2023 dan 57 desa mandiri hingga tahun 2026 dari 81 Desa

yang ada, sehingga capaian Desa Mandiri Kotawaringin Barat di tahun 2023 sebanyak 39 Desa.

1.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Efisiensi Anggaran 2023

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Nama Belanja	PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD			EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
			REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)		
			Rp	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.200.285.537	5.145.567.743	98,95	98,95	54.717.794	Efisiensi
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	154.397.300	153.224.482	99,24	99,24	1.172.818	Efisiensi
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	45.599.800	45.279.800	99,30	99,30	320.000	Efisiensi
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.297.181.983	5.088.984.339	96,07	96,07	208.197.644	Efisiensi
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.127.343.380	1.116.727.923	99,06	99,06	10.615.457	Efisiensi
	JUMLAH	11.824.808.000	11.549.784.287	97,67	97,67	275.023.713	Efisiensi

Sumber : Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat, 2023

Berdasarkan tabel efisiensi diatas bahwa realisasi keuangan dalam menjalankan program, kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp. 11.549.784.287 dengan nilai pagu anggaran Rp. 11.824.808.000, maka terdapat efisiensi sejumlah Rp. 275.023.713. Berikut merupakan beberapa kondisi yang menimbulkan efisiensi anggaran cukup besar antar lain :

1. Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa terdapat efisiensi sebesar Rp. 43.295.533 hal tersebut disebabkan oleh kondisi eksisting yang mana Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa namun anggaran tersebut kurang untuk pembayaran iuran BPJS dengan total tagihan sebesar Rp.71.193.960 Sedangkan anggaran yang tersedia hanya Rp. 43.295.533, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak dapat dibayarkan hal tersebut dikarenakan aturan pembayaran iuran yang tidak dapat diangsur
2. Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa terdapat efisiensi sebesar Rp. 43.295.533 hal tersebut disebabkan oleh kondisi eksisting yang mana Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa namun anggaran tersebut kurang untuk pembayaran iuran BPJS dengan total tagihan sebesar Rp.71.193.960 Sedangkan anggaran yang tersedia hanya Rp. 43.295.533, sehingga iuran BPJS Kesehatan tidak dapat dibayarkan hal tersebut dikarenakan aturan pembayaran iuran yang tidak dapat diangsur.
3. Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat efisiensi sebesar Rp. 151.695.154 DPT tidak sesuai dengan yang direncanakan dia awal penganggaran, berdasarkan updating data terbaru DPT ternyata lebih sedikit yang kedua tidak terjadi sengketa maka tidak dilaksanakan rapat sengketa sehingga anggaran tidak dipergunakan.

Selain dari sisi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung

dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral, sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Evaluasi SAKIP	Bappeda	Fasilitasi Pendampingan dan penyusunan Renja	Dokumen Perencanaan	Mendukung pencapaian target kinerja peningkatan kualitas pengawasan atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
		Organisasi	Pelaporan capaian kinerja	LKJIP	
2	Desa Mandiri	Bappeda	Fasilitasi Posyandu Fasilitasi Posyantek	Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan	
		Dinas Kesehatan	Penilaian dalam IKS Fasilitasi Posyandu	Nilai Indeks Ketahanan Sosial	
		Badan Kesbangpol	Keamanan dan Ketertiban dalam penilaian IKL	Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.5 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp 9.358.268.000 ,- pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp 11.824.808.000 ,- Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 11.549.784.287 atau sebesar 97,67 %. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Setelah Perubahan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional	11.238.827.044	10.964.639.287	97,56
	- Belanja Pegawai	4.032.181.329	3.993.528.302	99,04
	- Belanja Barang/Jasa	7.010.076.215	6.774.514.485	97,00
	- Belanja Hibah	196.596.500	189.136.200	96,22
2	Belanja Modal	585.980.956	585.145.000	99,86
	- Belanja Peralatan & Mesin	585.980.956	585.145.000	99,78
	TOTAL	11.823.908.000	7.443.488.091	97,67

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023

Adapun untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Sasaran Strategis 2	<i>Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel</i>			
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.200.285.537	5.145.567.743	98,95
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.862.220	30.626.930	90,45
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.872.620	24.865.480	99,97
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.700	749.000	49,94
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.250	1.499.550	99,95
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.700	499.350	99,93
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	499.700	499.000	99,86

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Sasaran Strategis 2	<i>Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel</i>			
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.990.450	1.415.100	47,32
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800	1.099.450	54,98
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.073.751.021	4.035.059.432	99,05
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.032.181.329	3.993.528.302	99,04
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.069.892	40.031.330	99,90
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	499.800	499.800	100,00
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	502.600	502.600	100,00
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	199.850	199.850	100,00
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.250	103.250	100,00
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.750	99.750	100,00
2.13.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	99.750	99.750	100,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.200.000	16.200.000	100,00
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.200.000	16.200.000	100,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.722.152	225.888.817	99,63
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.150	5.400.100	100,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.846.315	39.838.910	99,98
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.794.577	5.794.516	100,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.162.350	8.159.900	99,97
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.518.760	166.695.391	99,51
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585.980.956	585.145.000	99,86

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Sasaran Strategis 2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel			
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.870.000	494.870.000	100,00
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.499.999	12.450.000	99,60
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.610.957	77.825.000	99,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.539.038	183.127.114	94,62
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.463.238	49.975.570	90,11
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.075.800	133.151.544	96,43
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.727.550	69.017.850	98,98
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.876.800	14.433.850	97,02
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.860.000	17.860.000	100,00
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.990.750	36.724.000	99,28

Sumber: RFK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan			
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	154.397.300	153.224.482	99,24
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	154.397.300	153.224.482	99,24
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	8.069.700	7.794.252	96,59
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	136.328.000	135.533.630	99,42
2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	9.999.600	9.896.600	98,97
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	45.599.800	45.279.800	99,30
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	45.599.800	45.279.800	99,30

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan			
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	9.999.800	9.999.800	100,00
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	-	-
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.600.000	35.280.000	99,10
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.297.181.983	5.088.984.339	96,07
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.297.181.983	5.088.984.339	96,07
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49.411.850	47.870.300	96,88
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	893.162.550	849.867.017	95,15
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	44.999.810	44.168.810	98,15
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4.027.993.023	3.876.297.869	96,23
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.499.750	7.091.750	94,56
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.999.700	19.761.700	98,81
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14.999.900	12.754.793	85,03
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	200.711.500	193.278.200	96,30
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	18.403.900	17.903.900	97,28
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	20.000.000	19.990.000	99,95
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.127.343.380	1.116.727.923	99,06
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.127.343.380	1.116.727.923	99,06

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1	Mendorong pembangunan desa melalui transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan			
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	20.227.500	20.073.300	99,24
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4.999.650	4.799.650	96,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	75.465.500	75.368.930	99,87
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.980.650	9.831.100	98,50
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	-
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.016.670.080	1.006.654.943	99,01

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 sebesar 97,57 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi-nya Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi-nya dokumen Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3					3	3	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1					1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1					1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1					1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1					1	1	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2					2	2	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4					4	4	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31					31	31	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12					2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1					1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60					12	11	92%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya administrasi Barang milik daerah Pada Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2					2	2	100%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2					2	2	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2					2	2	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2					2	2	100%
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2					2	2	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31					31	27	87%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4					4	4	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20					18	18	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12					10	10	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		5			1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55					50	40	80%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1					1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2					2	2	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang pada Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12					12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12					12	12	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4					4	4	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40					26	26	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1					1	1	100%
BASE LINE 2022 SEBELUM PERUBAHAN									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
<i>Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar</i>		12	12	12	100%			
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan</i>		7	7	4	57%			
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan</i>		12	12	12	100%			
<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan</i>		12	12	12	100%			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	<i>Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan</i>		50	16	15	94%			
<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan</i>		36	35	35	100%			
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>		52	52	52	100%			
<i>Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.</i>	<i>Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>		45	40	40	100%			
<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>		6	6	6	100%			
<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman</i>		84	90	90	100%			
<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah</i>		65	70	32	46%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
<i>Pembangunan gedung kantor</i>	<i>Jumlah gedung kantor yang dibangun</i>		1		-				
<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan</i>		1	-	-				
Pengadaan meubelair	<i>Jumlah Meubelair yang diadakan</i>		2	-	-				
<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala</i>		7	4	4	100%			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		17	17	17	100%			
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		-	1	1	100%			
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab		0	-					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-				
Pengadaan Absensi/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan		1	0	0				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		39	40	40	100%			
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		39	40	40	100%			
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS									
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan		1	1	-				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis		14	14	14	100%			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keru									

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun</i>	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>			
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Pemerintahan Desa	100%					100%	0%	0%
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang telah dilakukan Penataan	100%					100%	0%	0%
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	6					3	0	0%
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1					0	0	0%
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	9							
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	6					3	0	0%
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1							
BASE LINE 2022 SEBELUM PERUBAHAN									
<i>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>									
<i>Pelaksanaan Musrenbang Desa</i>	<i>Jumlah Desa yg melaksanakan musrenbang tepat waktu</i>		<i>99,98</i>	<i>90</i>	<i>99,98</i>	<i>111%</i>			
<i>Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dan ketrampilan</i>		<i>96,58</i>	<i>90</i>	<i>96,58</i>	<i>107%</i>			
<i>Pelatihan Manajemen Keuangan Desa</i>	<i>Jumlah pelatihan diadakan</i>		<i>77,21</i>	<i>90</i>	<i>77,21</i>	<i>86%</i>			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa</i>	<i>Jumlah laporan movev ADD & DD</i>		98.59	90	98,59	110%			
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang memiliki Perjanjian Kerjasama	100%					100%	100%	100%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama BUMDES dan BUMDESMA	100%					100%	100%	100%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5					1	1	100%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5					1	1	100%
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	52					8	8	100%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel/baik	100%					100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang telah dilakukan pembinaan	100%					100%	100%	100%
	2. Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	100%					100%	100%	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	15							
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	162							
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	81					81	81	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	162					162	162	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	81							
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	18							
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	30					6	6	100%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	81					40	40	100%
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	30					6	6	100%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	50					35	35	100%
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2							
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6							
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162					162	162	100%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	3							

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	20							
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1							
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10					2	2	100%
BASE LINE 2022 SEBELUM PERUBAHAN									
<i>Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal</i>									
<i>Permodalan Bagi LKM dan UMKM di Perdesaan</i>	<i>Jumlah Pengelola LKM yang mendapat pelatihan</i>		97.14	90	97,14	108%			
<i>Kemitraan Usaha swasta dan UMKM di Perdesaan</i>	<i>Jumlah kegiatan FGD</i>		64.60	90	64,5	72%			
<i>Tata Kelola Manajemen BUMDesa dan BUMDesa Bersama</i>	<i>Jumlah pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama yang mendapat pelatihan</i>		99.35	90	99,35	110%			
<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar desa</i>	<i>Jumlah pengelola Pasar Desa yang mendapat pelatihan</i>		98.67	90	98,67	110%			
<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bumdesa dan Pasar Desa</i>	<i>Jumlah BUMDes, BUMDes Bersama dan Pasar yang di Monev</i>		97.97	90	97,97	109%			
<i>Peningkatan Kapasitas Pendampingan Desa</i>	<i>Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan P3MD</i>		99.18	90	99,18	110%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah dibina	100%					100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MASYARAKAT HUKUM ADAT									
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	100%					100%	100%	100%
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	5					1	1	100%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan endayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10					2	2	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15					3	3	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30					0	0	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15					0	0	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1					1	1	100%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5					0	0	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5					0	0	100%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25					5	5	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10					2	2	100%
BASE LINE 2022 SEBELUM PERUBAHAN									
<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</i>									
<i>Pembinaan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah PKK Aktif</i>		97.57	90	95,55	106%			
<i>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan</i>	<i>Jumlah desa yang mengikuti lomba BBGRM</i>		76.78	90	76,78	85%			
<i>Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan</i>	<i>Jumlah Desa/Kel yang dilakukan penilaian</i>		97.99	90	100	111%			
<i>Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</i>	<i>Jumlah Siswa yang di berikan PMT-AS</i>		88.88	90	100	111%			
<i>Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif</i>	<i>Jumlah Perempuan di Desa Sasaran yang diberikan pelatihan</i>		69.23	90	98,06	109%			
<i>Pelatihan Posyandu</i>	<i>Jumlah Kader Posyandu yang mendapat pelatihan</i>		97.44	90	99,4	110%			
<i>Penyusunan Profil Desa</i>	<i>Persentase Desa yang Telah Menyusun Profil Desa</i>		82.09	90	99,38	110%			
<i>Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3MD)</i>	<i>Jumlah Rapat Koordinasi P3MD yang terlaksana</i>		90	90	99,4	110%			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2023 - 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023	
				Target Perangkat Daerah Renja 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Pendataan Indeks Desa Membangun</i>	<i>Jumlah Desa yang dilakukan pendataan</i>		90	90	99,97	111%			
Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna									
<i>Pemetaan Kawasan Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah desa yang telah memetakan potensi SDA</i>		95.52	90	99.51				
<i>Gelar Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Teknologi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Gelar TTG yang diikuti</i>		92.50	90	99.94				
<i>Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Perdesaan</i>	<i>Jumlah Pengelola Pamsimas yang dilatih</i>		91.55	90	99.92				
<i>Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	<i>Prosentase pengurus Posyantek yang terlatih</i>		76.63	90	97.08				

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 sebesar 103 % dengan peringkat kinerja sangat tinggi.
2. Berdasarkan tabel efisiensi diatas bahwa realisasi keuangan dalam menjalankan program, kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp. 11.549.784.287 dengan nilai pagu anggaran Rp. 11.824.808.000, maka terdapat efisiensi sejumlah Rp. 275.023.713
3. Capaian kinerja keuangan 97,67% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.549.784.287

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Adanya Surat Edaran Nomor 100.1-1/8000/SJ Tentang Moratorium Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Adiministrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dengan adanya surat tersebut maka program Penataan desa utamanya pada sub kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa tidak terlaksana pada tahun yang telah ditetapkan.
2. Tidak tercapainya Sasaran Strategis dalam Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator nilai AKIP pada tahun 2023 adalah nilai **A (80,5)** sementara capaian nilai nilai AKIP tahun 2023 B (60,45). Persentase capaian adalah 75 %. Kondisi ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan nilai AKIP

sebelumnya pada tahun 2022 dengan nilai BB (71,40), kondisi ini terjadi oleh beberapa hal:

- a) Belum optimalnya koordinasi antar bidang secara terintegrasi dan massif terutama terkait sasaran strategis ke 2 yaitu Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator kinerja ialah Nilai AKIP
- b) Belum selaras pohon kinerja dengan cascading kinerja tingkat perangkat daerah.
- c) Tidak semua ASN menyusun SKP dan melaporkan tepat waktu.
- d) Tidak semua kepala bidang berkoordinasi dengan perencanaan dalam menyusun sasaran kinerja tahunan.
- e) Pemantauan laporan kinerja masing-masing ASN belum dilakukan secara maksimal dan masif.
- f) Belum dilakukan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- g) Adanya proses transisi dan adaptasi terhadap perubahan regulasi terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan perubahan struktur kerja organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mewujudkan keterpaduan dan keselarasan program serta kegiatan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah
- b) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan harmonis, mengingat target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan perangkat daerah/ instansi lingkup pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta stakeholder terkait.
- c) Upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa, dan kelembagaan desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Februari 2024
KEPALA DINAS,

YUDHI HUDAYA, S.STP
NIP. 19770127 199612 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

